



# Segregasi Gender dalam Organisasi Spasial Pesantren-Pesantren Besar di Pulau Jawa

Iwan Sudradjat<sup>1</sup> dan Bambang Triyoga<sup>2</sup>

[Diterima: 24 Februari 2016; disetujui dalam bentuk akhir: 16 Juni 2016]

**Abstrak.** Kehadiran santri wanita di dalam lingkungan pesantren-pesantren besar di Jawa yang dimulai sekitar tahun 1930, menuntut adanya penataan pola spasial yang terkait dengan pengendalian hubungan antar gender berupa segregasi antara zona kegiatan santri pria dan santri wanita. Penelitian ini mengkaji dinamika segregasi gender dalam organisasi spasial 18 pesantren besar yang tersebar di pulau Jawa sejak periode pendiriannya hingga masa kini. Data dikumpulkan dengan metode pengamatan langsung, wawancara dan studi dokumen kesejarahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa segregasi gender dalam organisasi spasial pesantren terungkap melalui konsep zona spesifik gender, teritorialitas dan batas. Tingkat toleransi dan fleksibilitas terhadap segregasi gender ditemukan pada zona kegiatan formal (madrasah atau sekolah), namun tidak ditemukan pada zona kegiatan non formal (asrama) dan zona kegiatan informal (fasilitas bermain, olahraga, rekreasi dan sosialisasi). Pesantren besar di Jawa Barat memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap segregasi gender di zona kegiatan formal, disusul oleh pesantren besar di Jawa Tengah, dan terakhir oleh pesantren besar di Jawa Timur. Kyai sebagai tokoh pimpinan karismatik, penentu kebijakan, dan pengambil keputusan bagi kepentingan pesantren sangat berpengaruh pada tingkat toleransi kelembagaan pesantren terhadap segregasi gender antara santri pria dan santri wanita yang terjadi di zona kegiatan formal (madrasah atau sekolah).

**Kata kunci.** Segregasi gender, organisasi spasial, pesantren besar, Jawa.

[Received: 24 February 2016; accepted in final version: 16 June 2016]

**Abstract.** The presence of female santris in big pesantren in Java, which started around 1930, demanded the organization of spatial patterns related to intergender relations in the form of a segregation of activity zones between male and female santris. This study assesses the dynamics of gender segregation in the spatial organization of 18 big pesantren located on Java Island since their establishment until now. The data were collected through field observation, interviews and study of historical documents. The results show that gender segregation in the spatial organization of the pesantren is manifested through the concepts of gender specific zones, territoriality, and boundary. Levels of tolerance and flexibility towards gender segregation are observed within the formal activity zone (madrasah or school), but not in non-formal (boarding houses) and informal (playgrounds, sports, recreation and social activities) zones. Big pesantren in West Java show the highest degree of tolerance towards gender segregation in formal activity zones, followed by big pesantren in Central Java, and lastly by those in East Java. The Kyai as a charismatic leader, policy creator, and decision maker for the

<sup>1</sup> Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganesa 10 Bandung 40132, E-mail: iwansudr@ar.itb.ac.id

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia.

*interests and benefits of the pesantren, has a significant influence on the level of tolerance of the pesantren as an institution towards gender segregation between male and female santri in the formal activity zone (madrasah or school).*

**Keywords.** *Gender segregation, spatial organization, big pesantren, Java.*

## **Pengantar**

Pesantren adalah asrama pendidikan Islam tradisional di mana siswanya tinggal bersama dan belajar ilmu-ilmu keagamaan di bawah bimbingan seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan kyai (Dhofier, 1982). Menurut catatan Direktorat Pendidikan Islam Departemen Agama RI, pada tahun 2008 di seluruh Indonesia terdapat 21.521 pesantren dengan 3.818.469 santri, di mana 77,62% dari pesantren dan 70,99% dari santri tersebut berada di pulau Jawa. Hal yang membedakan pesantren dengan lembaga pendidikan lain di Indonesia adalah hadirnya lima elemen pokok yang khas, yaitu: kyai, santri, masjid, pondok atau asrama, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik (Dhofier, 1982; Fadhillah 2011).

Kyai sebagai pemimpin utama merupakan pencipta, penerus tradisi, dan penentu arah pengembangan pesantren. Kyai memiliki otoritas tertinggi di lingkungan pesantren. Sistem nilai pesantren ditentukan oleh kyai pendiri dan kyai penerusnya. Meski demikian, kyai umumnya memiliki sikap yang terbuka terhadap perubahan, karena mereka berpegang pada prinsip bahwa pesantren harus “mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengadopsi hal baru yang lebih baik” (Dhofier, 1982; Mastuhu, 1994). Kyai juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat perdesaan di Jawa, baik dalam bidang spiritual, sosial, hingga politik. Dengan penghormatan yang tinggi dari masyarakat, banyak kyai yang kemudian terjun menjadi tokoh penggerak kegiatan kemasyarakatan.

Santri adalah pelajar yang mendapat didikan dari kyai, para ustad dan pembimbing di pesantren secara formal maupun informal. Berdasarkan sistem penghunian, santri dapat dibedakan menjadi santri *mukim* dan santri *kalong*. Santri *mukim* adalah santri yang menginap di asrama pesantren selama belajar di pesantren dan bertanggungjawab mengikuti kegiatan harian di pesantren di bawah bimbingan kyai dan ustad. Santri *kalong* adalah santri yang datang belajar di pesantren sesuai jadwal kegiatan belajar, tetapi mereka tinggal di rumahnya masing-masing yang lokasinya tidak terlalu jauh dari lokasi pesantren. Jumlah santri *mukim* dalam suatu pesantren umumnya jauh lebih banyak dibandingkan santri *kalong*.

Masjid merupakan pusat kosmos pesantren, ditunjang oleh fungsi simboliknya sebagai tempat paling sakral dan fungsi kesehariannya sebagai pusat kegiatan ritual ibadah dan pendidikan formal serta informal. Masjid umumnya berada di zona pusat lingkungan pesantren, dikelilingi oleh rumah kyai, asrama santri putra dan madrasah. Pondok atau asrama merupakan elemen yang sangat esensial bagi para santri, karena di tempat inilah para santri tinggal dan belajar di bawah binaan dan bimbingan santri senior yang berperan sebagai ketua asrama, ustad dan kyai. Pondok juga merupakan tempat para santri melaksanakan kegiatan domestik seperti membersihkan kamar dan lingkungan, mencuci pakaian, dan kegiatan lainnya.

Tradisi pendidikan pesantren di Indonesia yang telah dimulai sejak awal abad ke 15 pada mulanya hanya diselenggarakan khusus untuk para santri pria. Baru pada tahun 1919 Pesantren Denanyar di Jombang Jawa Timur mulai membuka kesempatan bagi sekelompok kecil santri wanita, dan kemudian meresmikannya pada tahun 1930. Upaya yang telah dilakukan oleh pesantren Denanyar disusul oleh Pesantren Seblak pada tahun 1939, Pesantren Tambak Beras,

Pesantren Al-Fatimiyyah pada tahun 1948, dan Pesantren Walisongo Cukir pada tahun 1957 (Srimulyani, 2007). Pada akhir tahun 1970an, semakin banyak pesantren yang membuka kesempatan bagi para santri wanita untuk menimba ilmu (Dhofier, 1982).

Pendidikan bagi santri wanita dalam pesantren umumnya dilakukan secara terpisah dari santri pria. Pemisahan antara santri pria dan wanita dilakukan untuk memudahkan pengawasan dan untuk mendidik tata pergaulan antara pria dan wanita menurut tuntunan ajaran Islam. Beberapa dasar tuntunan yang diikuti pesantren adalah larangan untuk berkontak mata secara sengaja antara pria dan wanita yang bukan *muhrim* dan cara berpakaian bagi kaum wanita (Quran, 24:30-31). Selain itu pesantren selalu berprinsip mengikuti mashab yang menempatkan pendapat para ulama *fiqih* dalam kitab-kitab klasik (kitab kuning) sebagai sandaran hukum. Kitab-kitab tersebut banyak mengharamkan kemunculan wanita di wilayah publik, walaupun wanita terpaksa tampil di wilayah publik maka haruslah dalam komunitas wanita saja (Mawardi, 2008). Bersandar pada Quran dan kitab-kitab klasik tersebutlah segregasi gender dalam lingkungan pesantren diterapkan. Selain pemisahan secara spasial, tata pergaulan santri pria dan wanita juga ditegaskan dalam peraturan pesantren yang biasanya tercantum dalam buku agenda santri, lengkap dengan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Beberapa peraturan yang membatasi pergaulan antara santri pria dan santri wanita antara lain adalah larangan untuk saling mengunjungi dan bepergian dengan santri lawan jenis, larangan untuk memasuki lingkungan asrama santri lawan jenis, serta larangan menerima surat dan menyimpan foto lawan jenis yang bukan *muhrim*. Pembatasan hubungan gender diterapkan secara ketat pada santri pria dan wanita, namun lebih longgar pada guru pria (*ustadz*) dan guru wanita (*ustadzah*). Guru pria dan wanita dapat duduk dan bercengkrama bersama dalam ruang kantor yang sama. Guru pria boleh mengajar santri wanita, tetapi guru wanita tidak boleh mengajar santri pria.

Meski akses terhadap pendidikan pesantren bagi santri wanita terbuka lebih belakangan dibandingkan dengan santri lelaki, namun secara kuantitas jumlah santri wanita berkembang dengan cepat. Pada tahun 2002 rasio jumlah santri pria dan wanita sudah hampir sebanding, yaitu 52.65% santri pria dan 47.35% santri wanita (Ministry of Religious Affairs, dalam Srimulyani, 2007). Kehadiran santri wanita dengan jumlah yang signifikan di dalam rona kehidupan pesantren yang berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran Islam dan ideologi masyarakat patriarki, menuntut adanya penataan pola spasial yang terkait dengan pengendalian hubungan antar gender, yaitu berupa segregasi gender antara santri pria dan santri wanita. Isu tentang penataan pola spasial dan fisik bangunan pesantren telah dibahas dalam beberapa studi terdahulu (Afshar, 1982; Budiyanto, 2010), namun tidak dalam kaitan dengan masalah peran dan hubungan gender. Aspek hubungan dan segregasi gender antara santri pria dan santri wanita dalam rona kehidupan pesantren telah disinggung dalam beberapa studi terdahulu (Raihani, 2012; Nilan, 2009; Maksum, 2007; Srimulyani, 2007), namun hanya sepintas dan tidak mendalam. Tinjauan tentang pengaruh karisma dan kepemimpinan Kyai terhadap tatanan kehidupan dan keberlanjutan tradisi pesantren telah dilakukan oleh peneliti terdahulu (Muflih dkk, 2014; Siregar dkk, 2013; Fauzi, 2012; Fadhilah, 2011), namun relevansinya dengan fenomena segregasi gender antara santri pria dan santri wanita di dalam lingkungan pesantren belum dibahas.

Makalah ini akan mengkaji pola-pola segregasi gender yang terjadi antara santri pria dan santri wanita dalam organisasi spasial pesantren-pesantren besar di pulau Jawa, serta dinamika perkembangannya sejak pesantren besar membuka akses bagi santri wanita hingga masa kini.

## Metodologi

Data yang digunakan dalam makalah ini merupakan bagian dari penelitian yang bersifat ekstensif tentang perubahan pola organisasi spasial pesantren besar di Pulau Jawa, meliputi 18 pesantren yang lokasinya tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Data dihimpun dengan menggunakan metode pengamatan lapangan, wawancara dan studi dokumen historis.

Istilah pesantren besar dalam lingkup penelitian ini merujuk pada pesantren yang jumlah santrinya pada suatu waktu pernah mencapai 1000 orang, berdiri pada periode 1900-1949 atau sebelumnya, dan cukup dikenal oleh masyarakat luas. Informasi dasar tentang 18 pesantren besar yang menjadi kasus studi dapat dilihat pada Tabel 1. Sebaran lokasinya di pulau Jawa dapat dilihat pada Gambar 1.

**Tabel 1.** Pesantren Besar di Jawa yang Menjadi Kasus Studi

Wilayah	Nama Pesantren	Lokasi	Tahun Berdiri	Jumlah Santri
Jawa Barat	Kempek	Cirebon	1908	1850
	Santi Asmoro	Majalengka	1932	439
	Pondok Buntet	Cirebon	1758	3645
	Cipasung	Tasikmalaya	1930	3000
	Al-Masthuriyah	Sukabumi	1920	2900
	Syamsul Ulum Gunung Puyuh	Sukabumi	1933	832
Jawa Tengah	Al Hikmah	Brebes	1922	5608
	Pabelan	Mungkid, Magelang	1800	529
	Sarang	Rembang	1850	4000
	Al-Ihya Ulumaddin	Cilacap	1924	3639
	Futuhiyah	Mranggen, Demak	1905	3308
	Al Munawir	Krapyak, Bantul	1911	1800
Jawa Timur	Tremas	Pacitan	1830	1831
	An Nuqoyah	Gulul-Guluk, Madura	1838	7000
	Tebu Ireng	Jombang	1899	1338
	Salafiyah Syafi'iyah	Situbondo	1914	11428
	Hidayatul Mubtadin	Lirboyo, Kediri	1910	7600
	Langitan	Tuban	1852	3500

Sumber: Data Lapangan Tahun 2008

Pada periode 1900-1949 baru sebagian kecil pesantren yang membuka akses bagi santri wanita, yaitu Pesantren Sukorejo di Jawa Timur pada tahun 1925 dan Pesantren Cipasung di Jawa Barat pada tahun 1940. Pada periode 1950-1966 sebagian besar pesantren di Jawa Barat dan Jawa Timur sudah membuka akses bagi santri wanita, kecuali Pesantren Gunung Puyuh dan Tebuireng, sementara di Jawa Tengah yang sudah membuka akses untuk santri wanita adalah Pesantren Futuhiyyah dan Krapyak. Pada periode 1967-2007 seluruh pesantren di Jawa sudah membuka akses bagi santri wanita. Mempertimbangkan data perkembangan historis tersebut, penelitian tentang segregasi gender dalam organisasi spasial pesantren-pesantren besar di Jawa difokuskan pada periode sejak 1967 hingga masa kini, di mana tersedia data empirik lapangan yang cukup lengkap dan akurat.



**Gambar 1.** Lokasi Pesantren Besar di Jawa yang menjadi kasus studi (Sumber peta dasar: Encarta Encyclopedia, 2004)


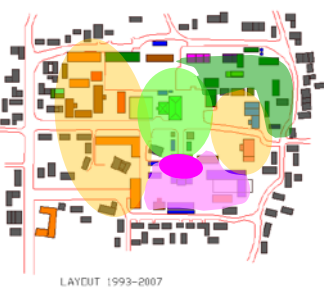



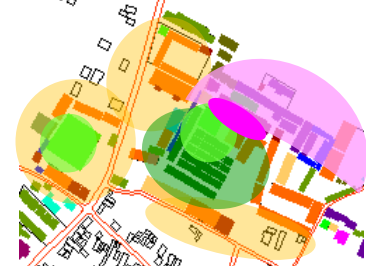


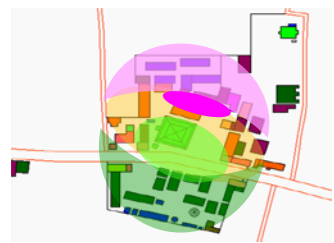




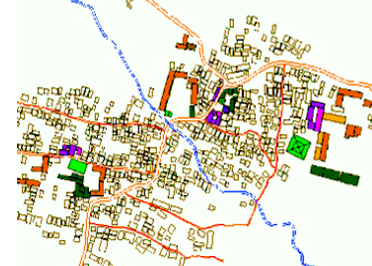
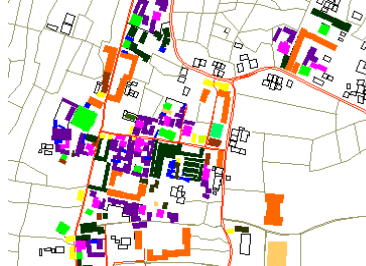
Jawa Barat	Jawa Tengah dan Yogyakarta	Jawa Timur dan Madura
1. Pesantren Kempek, Cirebon	7. Pesantren Al-Hikmah, Brebes	13. Pesantren Tebu Ireng, Jombang
2. Pesantren Santi Asromo, Majalengka	8. Pesantren Pabelan, Magelang	14. Pesantren An-Nuqoyah, Madura
3. Pesantren Al-Masthuriyah, Sukabumi	9. Pesantren Sarang, Rembang	15. Pesantren Hidayatul Muhtadin, Kediri
4. Pesantren Cipasung, Tasikmalaya	10. Pesantren Ihya Ulumuddin, Cilacap	16. Pesantren Langitan, Tuban
5. Pesantren Buntet, Cirebon	11. Pesantren Futuhiyyah, Demak	17. Pesantren Salafi Syafi'iyah, Situbondo
6. Pesantren Gunung Puyuh, Sukabumi	12. Pesantren Al-Munawir, Krapyak Bantul	18. Pesantren Tremas, Pacitan

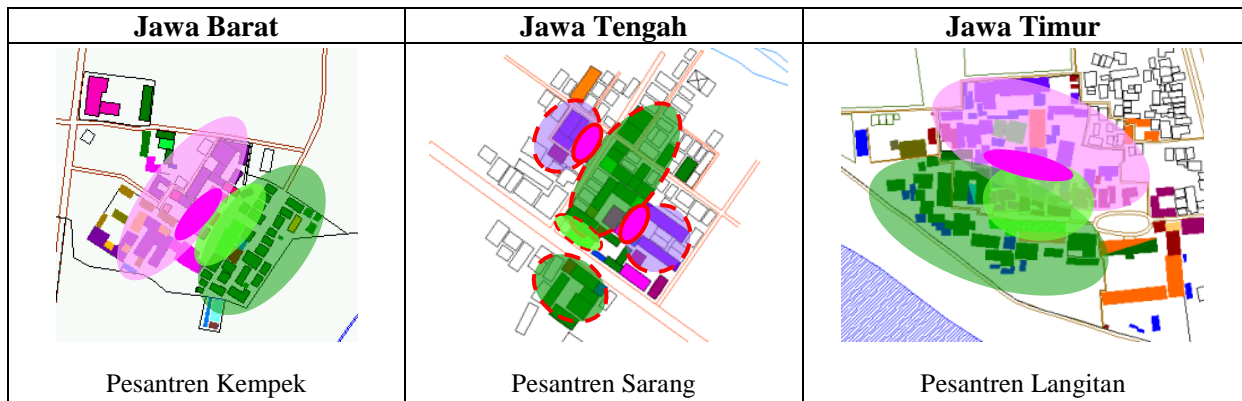
### Data dan Analisis

Pola tata ruang pesantren umumnya bersifat organik, tidak memiliki sumbu atau tatanan yang beraturan, karena proses perkembangannya terjadi secara inkremental dan cenderung menyesuaikan dengan kondisi serta kendala lingkungan yang ada. Bangunan bangunan dalam kompleks pesantren tidak memiliki orientasi tertentu, kecuali bangunan masjid yang selalu berorientasi ke arah Qiblat. Secara fungsional pesantren memiliki 3 zona kegiatan utama, yaitu masjid sebagai tempat beribadah, asrama santri sebagai tempat hunian, dan madrasah atau sekolah sebagai tempat belajar formal. Hampir semua pesantren di Jawa menempatkan zona masjid, rumah kyai dan keluarganya sebagai pusat lingkungan pesantren, dan dalam banyak kasus secara purposif juga berfungsi memisahkan klaster asrama santri pria dan klaster asrama santri wanita. Klaster asrama santri wanita umumnya bersifat tertutup, diberi pagar dan pintu untuk keluar-masuk, memiliki mushola sendiri, bahkan dalam banyak kasus memiliki madrasah atau sekolah tersendiri, terutama pada pesantren *salafi*.

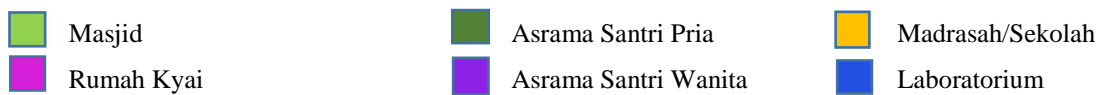
Segregasi gender dalam organisasi spasial pesantren mencerminkan tingkat konsistensi pimpinan pesantren dalam menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam dan budaya patriarki, yang terungkap melalui konsep zona spesifik gender, teritorialitas, dan batas. Pemetaan dasar pola segregasi gender pada 18 pesantren besar di Jawa dilakukan untuk zona kegiatan formal (madrasah, sekolah), non formal (asrama) dan informal (fasilitas bermain, olah raga, rekreasi dan sosialisasi).

Hasil pemetaan dasar pola segregasi gender secara garis besar dapat dilihat pada Gambar 2.

Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur
 <p data-bbox="233 663 517 689">Pesantren Al-Masthuriyah</p>	 <p data-bbox="676 663 871 689">Pesantren Pabelan</p>	 <p data-bbox="1082 663 1307 689">Pesantren Tebuireng</p>
 <p data-bbox="268 987 481 1014">Pesantren Cipasung</p>	 <p data-bbox="612 987 935 1014">Pesantren Al-Ihya Ulumaddin</p>	 <p data-bbox="1091 987 1300 1014">Pesantren Sukorejo</p>
 <p data-bbox="236 1294 510 1321">Pesantren Gunung Puyuh</p>	 <p data-bbox="655 1294 896 1321">Pesantren Futuhiyyah</p>	 <p data-bbox="1098 1294 1303 1321">Pesantren Tremas</p>
 <p data-bbox="280 1599 469 1626">Pesantren Buntet</p>	 <p data-bbox="668 1599 877 1626">Pesantren Krapyak</p>	 <p data-bbox="1091 1599 1300 1626">Pesantren Lirboyo</p>
 <p data-bbox="240 1939 505 1966">Pesantren Santi Asromo</p>	 <p data-bbox="652 1939 893 1966">Pesantren Al-Hikmah</p>	 <p data-bbox="1066 1939 1326 1966">Pesantren An-Nuqoyah</p>



**Gambar 2.** Pemetaan Pola Segregasi Gender Dalam Organisasi Spasial Pesantren Besar di Jawa



Dalam organisasi spasial pesantren-pesantren besar di Jawa, segregasi gender yang terjadi dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni:

1. **Segregasi gender penuh**, meliputi pemisahan kegiatan formal (madrasah, sekolah), non formal (asrama) dan informal (fasilitas olah raga, rekreasi dan sosialisasi) antara santri pria dan wanita, ditandai dengan pemisahan yang tegas antara zona, teritori dan batas kegiatan santri pria dan santri wanita dalam berbagai aspek kehidupan. Segregasi gender secara penuh umumnya dilakukan oleh pesantren yang masih menerapkan pola *salafi*, di mana *kitab kuning* digunakan sebagai elemen utama dalam kurikulum dengan metode pembelajaran tradisional seperti *sorogan*, *bandongan* dan *halaqoh*.
2. **Segregasi gender sebagian**, meliputi pemisahan kegiatan nonformal dan informal, namun tidak sepenuhnya untuk kegiatan formal. Segregasi gender sebagian umumnya dilakukan oleh pesantren yang menerapkan pola *kholafi*, di mana *kitab kuning* tidak lagi digunakan sebagai elemen utama dalam kurikulum, dan sistem pendidikan modern berupa kelas berjenjang serta ilmu pengetahuan dasar seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan mata ajar lainnya diadopsi. Sikap toleran terhadap segregasi gender yang longgar tampak pada pesantren yang menerapkan pola *kholafi* di wilayah Jawa Barat, dibandingkan dengan pesantren yang menerapkan pola *salafi* dan *kholafi* di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Segregasi gender pada zona kegiatan non formal, yaitu asrama, cenderung diterapkan dengan ketat oleh pesantren yang menerapkan pola *salafi* maupun *kholafi*, antara lain dengan cara menjauhkan jarak asrama santri pria dan wanita, membangun pagar pembatas antara asrama santri pria dan wanita, atau menempatkan asrama santri pria dan wanita dalam bangunan yang berbeda, masing-masing dengan tingkat ketegasan yang beragam untuk tiap pesantren. Wujud fisik segregasi gender pada zona kegiatan non formal (asrama santri) dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Kategori Pesantren dan Wujud Fisik Segregasi Gender pada Zona Kegiatan non Formal (Asrama)

WILAYAH	Wujud Fisik Segregasi Gender Kategori Pesantren	Lahan yang berbeda dan berpagar	Lahan yang sama tetapi berpagar, berdinding, atau dibatasi bangunan pemisah	Lahan yang sama dan tidak berpagar	Bangunan yang berbeda
JAWA BARAT	Salafi		Kempek		
	Kombinasi		Gunung Puyuh Buntet		
	Kholafi		Santi Asromo	Cipasung	Al-Masthuriyah
JAWA TENGAH	Salafi		Sarang		
	Kombinasi		Ihya Ulumaddin Al-Hikmah Futuhiyyah		Krapyak
	Kholafi			Pabelan	
JAWA TIMUR	Salafi		Langitan		
	Kombinasi		Lirboyo Sukorejo An-Nuqoyah Tremas		
	Kholafi	Tebuireng			

Dari Tabel 2 tampak bahwa sebagian besar pesantren menempatkan zona kegiatan non formal berupa asrama untuk santri pria dan santri wanita pada lahan yang sama, tetapi keduanya dibatasi oleh pagar, dinding, atau bangunan pemisah, sehingga terjadi segregasi absolut antara klaster asrama santri pria dan wanita. Bangunan pemisah yang digunakan untuk membatasi zona kegiatan asrama pria dan wanita adalah rumah kyai dan keluarganya serta masjid. Secara diagramatik, pola segregasi yang terjadi dapat dijelaskan seperti pada Gambar 3.



**Gambar 3.** Segregasi Klaster Asrama Santri Pria dan Asrama Santri Wanita



Segregasi gender pada zona kegiatan formal diterapkan dengan variasi yang beragam pada pesantren-pesantren di Jawa, dari wujud fisik yang sangat tegas berupa pagar, hingga yang tanpa pemisahan sama sekali akibat diterapkannya pendidikan dengan sistem ko-edukasi (pendidikan siswa pria dan wanita dalam kelas yang sama). Pesantren-pesantren di Jawa Barat umumnya lebih terbuka untuk mengadopsi sistem ko-edukasi bila dibandingkan dengan pesantren-pesantren di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Tingkatan segregasi gender dalam pendidikan formal pesantren-pesantren besar di Jawa dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Kategori Pesantren dan Wujud Fisik Segregasi Gender pada Zona Kegiatan Formal (Madrasah, Sekolah)

WILAYAH	Wujud Fisik Segregasi Gender	Penempatan pada Zona dan Bangunan yang Terpisah	Penempatan pada Bangunan dengan Zona yang Berbaur	Pemisahan pada Ruang dengan Memberi Sekat	Tidak Ada Pemisahan dan Menerapkan Ko-Edukasi
	Kategori Pesantren				
JAWA BARAT	Salafi	Kempek			
	Kombinasi	Buntet			Gunung Puyuh
	Kholafi			Al-Masthuriyah	Cipasung Santi Asromo
JAWA TENGAH	Salafi	Sarang			
	Kombinasi	Ihya Ulumaddin	Al-Hikmah		Futuhiyyah Krapyak
	Kholafi	Pabelan			
JAWA TIMUR	Salafi	Langitan			
	Kombinasi	Lirboyo Sukorejo An-Nuqoyah	Tremas		
	Kholafi				Tebuireng

Dari data pada Tabel 3 tampak bahwa segregasi gender diterapkan pada zona madrasah dan sekolah dengan derajat yang berbeda-beda. Seluruh pesantren *salafi* di Jawa menerapkan segregasi mutlak antara zona santri pria dan santri wanita, baik untuk zona asrama maupun zona madrasah. Sebagian pesantren *kholafi* tidak memisahkan zona madrasah untuk santri pria dan santri wanita, pemisahan hanya dilakukan pada bangunan atau kelasnya saja. Pesantren di Jawa Barat mempunyai toleransi yang lebih besar dalam hal segregasi gender dibandingkan dengan pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pesantren di Jawa Timur cenderung menerapkan segregasi gender secara lebih tegas dibandingkan dengan pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pesantren *kholafi* di seluruh Jawa mempunyai toleransi yang lebih besar dibandingkan dengan pesantren-pesantren kombinasi dan *salafi*, sedangkan pesantren *salafi* mempunyai toleransi yang paling kecil atau lebih tegas dalam menerapkan segregasi gender di lingkungan pesantren, karena hampir seluruh kitab kuning yang membahas hukum gender memberikan ketegasan tentang segregasi gender.

Data penelitian secara signifikan menunjukkan bahwa segregasi gender dalam organisasi spasial pesantren-pesantren besar di Pulau Jawa masih sangat kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran

Islam, budaya patriarki, tradisi lokal, serta sikap Kyai dalam menghadapi tantangan jaman. Prinsip pemisahan yang tegas antara zona kegiatan santri pria dan santri wanita melandasi penataan konfigurasi fisik pesantren pada skala makro hingga mikro, sehingga cukup absah bagi peneliti untuk menyimpulkan bahwa konfigurasi fisik pesantren-pesantren besar di Pulau Jawa secara konsisten mencerminkan tata hubungan atau struktur gender yang berlaku dalam komunitasnya. Tingkat segregasi gender yang cenderung bersifat tetap (*stable*) dijumpai pada zona kegiatan non formal (asrama) dan informal (fasilitas olah raga, rekreasi dan sosialisasi), sementara tingkat segregasi gender yang cenderung berubah (*dynamic*) dijumpai pada zona kegiatan formal (madrasah, sekolah). Perubahan tingkat segregasi gender pada zona kegiatan formal antara lain disebabkan oleh pengaruh intervensi pemerintah di masa Orde Baru dan Orde Reformasi (1967-2007) dalam bentuk penetapan standar mutu pendidikan (kurikulum), sistem penjurusan pendidikan, subsidi anggaran dan bantuan penyediaan fasilitas pembelajaran (sarana gedung dan peralatan laboratorium). Program pemerintah tersebut secara tidak langsung berimbas pada pelaksanaan program pendidikan dan tata hubungan gender antara santri pria dan wanita di lingkungan madrasah dan sekolah.

Potensi perubahan struktur gender pada pesantren-pesantren besar di Pulau Jawa tidak terletak pada santri pria dan wanita sebagai peserta didik, tetapi sepenuhnya pada kyai sebagai pemegang otoritas tertinggi yang menentukan sistem nilai serta arah pengembangan pesantren, didukung oleh para guru pria (*ustadz*) dan guru wanita (*ustadzah*) sebagai tokoh panutan (*role model*) para santri. Kyai pesantren yang menerapkan pola salafi umumnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang sangat ortodok, sehingga memiliki resistensi yang tinggi terhadap tantangan perubahan struktur gender dan tingkat segregasi gender. Sementara itu kyai pesantren yang menerapkan pola *kholafi* menunjukkan sikap yang lebih toleran terhadap perubahan struktur gender dan tingkat segregasi gender, sehingga seiring dengan perkembangan waktu, perubahan yang telah terjadi pada zona kegiatan formal secara bertahap akan terbawa ke zona non formal dan informal sampai batas tertentu. Perlu dicatat bahwa penghapusan segregasi gender secara penuh bukanlah target yang diharapkan terjadi pada lingkungan pesantren, karena apabila hal tersebut terjadi maka pesantren akan kehilangan identitas dan maknanya sebagai institusi yang menegakkan nilai-nilai ajaran Islam.

Segregasi gender merupakan fenomena nyata yang ditemukan dalam lingkungan perdesaan maupun perkotaan di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat beragam, bisa berakar pada faktor agama, budaya, sosial, politik dan ekonomi. Isu segregasi gender penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan wilayah dan kota, karena berkaitan erat dengan pemenuhan tujuan penciptaan ruang kehidupan yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat luas. Hasil penelitian tentang segregasi gender dalam konteks organisasi spasial pesantren-pesantren besar di Pulau Jawa telah memberikan gambaran tentang struktur gender dalam lingkungan sosial budaya yang masih bersifat tradisional dan relatif tertutup seperti pesantren, di tengah rona lingkungan rural dan urban yang berkembang demikian cepat di bawah pengaruh modernisasi dan globalisasi. Gambaran tentang segregasi gender pada pesantren-pesantren di luar Pulau Jawa perlu segera diusahakan untuk memberikan wawasan yang lengkap tentang hubungan antara struktur gender dan organisasi spasial pada pesantren-pesantren di Indonesia, agar dapat diantisipasi strategi jangka panjang yang efektif untuk mengurangi tingkat segregasi gender pada pesantren-pesantren di Indonesia, sehingga lambat laun pesantren-pesantren bisa menjadi bagian integral dari sistem lingkungan perdesaan dan perkotaan yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan luasan area yang berkisar antara 0.2 hingga 10 hektar, pesantren terlalu penting untuk diabaikan sebagai elemen pembentuk lingkungan fisik dan sosial budaya masyarakat rural maupun urban.

## Kesimpulan

Tingkat toleransi terhadap segregasi gender sangat ditentukan oleh orientasi dan sikap kyai pesantren, terutama kyai pendirinya, yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya. Kyai pendiri yang berkesempatan belajar cukup lama di Makkah Saudi Arabia sangat kuat berpegang pada konsep segregasi gender yang tegas, dibanding kyai pendiri yang belajar di pesantren lokal. Kyai pendiri merupakan peletak dasar aturan dan prinsip-prinsip kepesantrenan yang kemudian menjadi tradisi pesantren, yang diteruskan oleh para kyai selanjutnya. Walaupun demikian, kyai penerus bisa mempunyai sikap yang berlainan dengan kyai pendiri, terutama jika latar belakang pendidikan mereka berbeda. Kyai penerus pada periode 1967-2007 banyak yang mendapatkan pendidikan tidak hanya dari lembaga pendidikan non formal pesantren, tetapi dari pendidikan formal bahkan banyak di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Keilmuan Islam bagi pesantren tidak lagi hanya bersumber dari Saudi Arabia (Makkah dan Madinah), tetapi juga dari wilayah lain seperti Mesir, Pakistan, Turki dan negara lain yang relatif lebih longgar dalam penerapan segregasi gender.

Toleransi terhadap segregasi gender dalam pendidikan formal juga dipengaruhi oleh keterbatasan rasio tenaga pengajar dan lokal kelas terhadap jumlah santri atau siswanya, seperti yang terjadi pada pesantren Al-Masthuriyah di Jawa Barat, di mana kelas santri pria dan wanita dipisahkan oleh tabir pemisah dan pengajaran diberikan oleh seorang pengajar.

Proses modernisasi secara gradual telah membawa pesantren besar di Jawa pada sikap yang lebih terbuka dan toleran terhadap perubahan, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai utama ajaran Islam. Dinamika segregasi gender dalam organisasi spasial pesantren di Jawa dapat dibaca sebagai indikator tingkat keterbukaan Kyai sebagai pimpinan pesantren terhadap perubahan peran dan hubungan gender di antara santri pria dan wanita dari waktu ke waktu, terutama pada zona kegiatan formal (madrasah, sekolah) dari pesantren.

Di era globalisasi pesantren akan semakin dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi lulusannya secara berkelanjutan, menerapkan prinsip pendidikan multikultural, serta memperhatikan isu kesetaraan dan keadilan gender. Para kyai akan dituntut untuk lebih progresif, kreatif dan adaptif dalam menghadapi tantangan jaman. Perubahan dan pembaharuan harus secara terus menerus dilakukan untuk mensejajarkan kedudukan pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya, dan menjadikan pesantren sebagai lembaga edukasi, religi dan sosiokultural yang bermartabat. Akan terbuka ruang yang semakin lebar bagi perluasan peran dan hubungan gender dalam konteks kehidupan di lingkungan pesantren, yang akan membuka sekat-sekat segregatif tanpa menghapuskan citra pesantren sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam.

## Daftar Pustaka

- Afshar, F. (1982) Pesantren in Java: Local Institutions and Rural Development, dalam Brian Brace Taylor (Ed.), *The Changing Rural Habitat; Volume 1: Case Studies*. Singapore: Concept media/The Aga Khan Award for Architecture.
- Budiyanto, H. (2010) The Change of Layout Model of Mosque in Islamic Boarding School (Pesantren) of Municipalities in Indonesia. Universitas Merdeka, Malang, [http://www.academia.edu/11026633/The\\_Change\\_of\\_Layout\\_Model\\_of\\_Mosque\\_in\\_Islamic\\_Boarding\\_School\\_Pesantren\\_of\\_Municipalities\\_in\\_Indonesia](http://www.academia.edu/11026633/The_Change_of_Layout_Model_of_Mosque_in_Islamic_Boarding_School_Pesantren_of_Municipalities_in_Indonesia), diunduh 22 Februari 2016.
- Dhofier, Z. (1982) *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta : LP3ES.

- Fadhilah, A. (2011). Struktur dan Pola Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren di Jawa. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8(1), 101-120.
- Fauzi, M.L. (2012) Traditional Islam in Javanese Society: The Roles of Kyai and Pesantren in Preserving Islamic Tradition and Negotiating Modernity. *Journal of Indonesian Islam* 6(1), 127- 146.
- Maksum, R (2007) Pesantren sebagai Agen Perubahan Isu-Isu Perempuan, <http://www.wahidinstitute.org/Program/peta-dan-isu-gerakan-perempuan-islam-di-indonesia>, diunduh 22 Februari 2016.
- Mastuhu (1994) *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta:INIS.
- Mawardi, K. (2008) Madrasah Banat, Potret Pendidikan Anak Perempuan NU Masa Kolonial Belanda. *Jurnal Yin Yang* 3(2), 239-254. PSG STAIN Purwokerto.
- Muflih, A., Armanu, Djumahir, dan Solimun (2014) Leadership Evolution of Salafiyah Boarding School Leader at Lirboyo Kediri. *International Journal of Business and Management Invention* 3(3), 34-50.
- Nilan, P (2009) The 'Spirit of Education' in Indonesian Pesantren. *British Journal of Sociology of Education* 30(2), 219-232.
- Raihani (2012) Report on Multicultural Education in Pesantren. *Compare: a Journal of Comparative and International Education* 42(2), 585-605.
- Siregar, F.M., N.K. Setiawan, dan R. Setio (2013) Religious Leader and Charismatic Leadership in Indonesia: The Role of Kyai in Pesantren di Java. *Kawistara* 3(2) Agustus, 140-152.
- Srimulyani, E. (2007) Muslim Women and Education in Indonesia: The Pondok Pesantren Experience. *Asia Pacific Journal of Education* 27(1), 85-99.